

DINAMIKA PERUBAHAN KEBIJAKAN POLITIK DI ERA DIGITAL

**Yulius Yohanes ⁽¹⁾, Reni Puji Lestari ⁽²⁾, Kariana Noviana ⁽³⁾, Nengsih Juniarti ⁽⁴⁾,
Grace Kurniati ⁽⁵⁾**

Program Studi Magister Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

Yulius.yohanes@fisip.untan.ac.id⁽¹⁾, lestari23@gmail.com⁽²⁾, kariananoviana16@gmail.com⁽³⁾,
nengsihjuniarti0679@gmail.com⁽⁴⁾ gracekurniati87@gmail.com⁽⁵⁾

ABSTRACT

This article examines changes in political policy in the digital age, influenced by information and communication technology in decision-making. In an era of globalization and more open access to information, political policies have become clearer and more accountable. However, new challenges have emerged, such as the spread of misinformation and divisions in public opinion. Through case analysis and existing data, this article investigates how political parties and governments adapt to these changes and how this impacts public participation. The research findings indicate that policies responsive to needs in the digital world can enhance public participation and strengthen democracy.

Keywords: Political Policy, Information Technology, Community Participation

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji perubahan dalam kebijakan politik di zaman digital, yang dipengaruhi oleh teknologi informasi dan komunikasi dalam pengambilan keputusan. Dalam era globalisasi dan akses informasi yang lebih terbuka, kebijakan politik menjadi lebih jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun, muncul tantangan baru, seperti penyebaran informasi yang salah dan perpecahan dalam pandangan masyarakat. Melalui analisis kasus dan data yang ada, artikel ini menyelidiki bagaimana partai politik serta pemerintah menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut dan bagaimana hal itu berdampak pada partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan di dunia digital dapat meningkatkan partisipasi publik dan memperkuat demokrasi.

Kata Kunci : Kebijakan Politik, Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat

PENDAHULUAN

Era digital telah membuat perbedaan besar dalam banyak aspek kehidupan, termasuk di bidang politik. Transformasi ini ditandai dengan munculnya teknologi informasi dan komunikasi yang mempengaruhi cara pemerintah, masyarakat, dan aktor politik berinteraksi. Kebijakan politik yang dahulu cenderung bersifat konvensional kini harus beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika yang dihasilkan oleh perkembangan digital. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik. Di era digital ini, peran media sosial semakin dominan dalam membentuk dan memengaruhi dinamika politik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global (*Sasmita, 2011*).

Dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan media sosial, akses terhadap informasi politik menjadi lebih mudah dan luas. Platform media sosial, aplikasi mobile, dan alat digital lainnya memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan pendapat, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam diskusi politik dengan mudah dan cepat (*Halim, Umar & Jauhari, Kurnia Dyah, 2019*). Namun, hal ini juga membawa tantangan baru terkait dengan validitas, keandalan, dan

integritas informasi politik yang disampaikan melalui platform-platform digital tersebut. Peran media sosial dalam membentuk opini publik menjadi semakin signifikan.

Media sosial memberikan wadah bagi berbagai kelompok dan individu untuk mengekspresikan pandangan politik mereka secara langsung, namun sekaligus juga dapat menjadi wadah untuk penyebaran disinformasi dan propaganda politik yang tidak bertanggung jawab. Tantangan etika politik dalam era digital juga terkait dengan penggunaan data politik dan privasi individu. Dengan pengumpulan data yang luas oleh perusahaan teknologi dan pemerintah, muncul pertanyaan etis tentang bagaimana data ini digunakan untuk kepentingan politik, serta tentang hak privasi individu dalam menghadapi ancaman penggunaan data yang tidak etis. Salah satu isu penting dalam tantangan etika politik dalam era digital adalah polarisasi politik yang semakin meningkat.

Media sosial sering kali memperkuat filter gelembung (*echo chamber*), di mana pengguna hanya terpapar pada pandangan yang sudah sejalan dengan keyakinan mereka sendiri, meningkatkan polarisasi dan menurunkan kemampuan untuk berdialog antar pendapat yang berbeda, penting untuk mengakui bahwa

tantangan etika politik dalam era digital tidak hanya bersumber dari teknologi itu sendiri, tetapi juga dari bagaimana teknologi tersebut digunakan dan dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik, termasuk partai politik, pemerintah, dan individu. Disamping itu, penting juga untuk diakui bahwa tantangan etika politik dalam era digital tidak memiliki solusi yang mudah. Setiap solusi yang diusulkan harus mempertimbangkan berbagai pertimbangan etis, serta efeknya terhadap kebebasan berbicara, hak privasi, dan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar.

Dalam konteks ini, dinamika perubahan kebijakan politik mencakup beberapa aspek, seperti peningkatan transparansi, aksesibilitas informasi, serta partisipasi masyarakat yang lebih luas. Media sosial, platform digital, dan alat komunikasi terbaru memungkinkan warganet untuk terlibat langsung dalam diskusi politik, menyuarakan pendapat, dan mempengaruhi pengambilan keputusan.

Namun, perubahan ini juga menimbulkan tantangan, seperti penyebaran informasi palsu, polarisasi opini, dan dampak negatif dari privasi dan keamanan data. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang dinamika ini sangat penting bagi

pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum. Perubahan kebijakan politik sering kali membawa tantangan baru yang signifikan. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa tantangan tersebut:

1. **Penyebaran Informasi Palsu:** Di era digital, informasi dapat tersebar dengan cepat. Kebijakan baru yang tidak diimbangi dengan komunikasi yang jelas dapat menyebabkan mis informasi. Informasi palsu ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan keputusan politik.
2. **Polarisasi Opini:** Perubahan kebijakan sering kali memicu perdebatan sengit. Hal ini dapat mengakibatkan polarisasi, di mana masyarakat terbagi menjadi kelompok yang saling berlawanan. Polarisasi ini dapat memperburuk konflik sosial dan menghambat dialog konstruktif.
3. **Dampak Negatif terhadap Privasi dan Keamanan Data:** Dengan kebijakan yang lebih ketat terkait pengumpulan data, ada risiko pelanggaran privasi. Masyarakat perlu memahami bagaimana data mereka digunakan dan dilindungi. Kebijakan yang buruk dapat

menyebabkan kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang dinamika ini sangat penting. Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan implikasi dari keputusan mereka, sementara akademisi dan masyarakat umum juga harus aktif dalam mendiskusikan dan memahami isu-isu ini.

Keterlibatan semua pihak akan membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat dan informatif. Melalui kajian ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan politik beradaptasi dalam menghadapi perubahan yang dibawa oleh era digital, serta implikasi dari perubahan tersebut terhadap tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia politik mengalami transformasi signifikan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital. Perubahan ini tidak hanya terlihat dalam cara para pemimpin politik berkomunikasi dengan rakyat tetapi juga dalam bagaimana kebijakan dibuat, diimplementasikan, dan dievaluasi. Artikel ini akan membahas beberapa isu politik terkini yang relevan dengan era digital ini, termasuk penggunaan media sosial dalam kampanye politik, privasi

data warga negara, serta tantangan etis yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi.

METODE

Tinjauan pustaka merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini. Dengan menganalisis secara mendalam informasi yang sudah ada, metode ini membantu peneliti untuk memahami peristiwa-peristiwa tertentu. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali topik dengan baik tanpa perlu melakukan penelitian langsung. Proses pengumpulan data mencakup menemukan, menilai, dan menganalisis tulisan-tulisan sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian kata kunci, pencarian sumber, serta penilaian kritis terhadap sumber yang ditemukan adalah beberapa langkah dalam proses ini. Untuk mencapai kesimpulan yang menyeluruh, data selanjutnya dianalisis dengan membandingkan hasil-hasil dari berbagai sumber.

PEMBAHASAN

1. Penggunaan Media Sosial Dalam Kampanye Politik

Dalam era digital yang semakin maju, media sosial telah menjadi platform yang kuat untuk berbagi informasi, mempengaruhi opini, dan

memobilisasi massa. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana penggunaan media sosial dalam kampanye politik mempengaruhi partisipasi politik dan persepsi publik. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap politik, terutama melalui media sosial yang menjadi alat utama dalam kampanye politik modern. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai platform untuk menyebarkan ideologi politik, membentuk opini publik, serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Media sosial telah menjadi alat yang kuat dalam kampanye politik. Partai politik dan calon menggunakan platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk menjangkau pemilih secara langsung. Aplikasi mobile dan alat digital lainnya juga memainkan peran penting dalam mempermudah organisasi dan koordinasi aksi politik. Melalui aplikasi yang dirancang untuk kampanye, petisi, atau gerakan sosial, masyarakat dapat mengorganisir kegiatan, mengumpulkan tanda tangan, dan memobilisasi peserta dengan efisiensi yang tinggi. Ini

memungkinkan terjadinya partisipasi politik yang lebih terstruktur dan terorganisir, serta mempercepat respon terhadap isu-isu yang berkembang (Josep, 2018). Ini memungkinkan komunikasi yang lebih personal dan interaktif, serta penyebaran pesan politik dengan cepat. Salah satu cara politisi berkomunikasi adalah melalui kampanye politik, yang dijalankan oleh Kampanye politik adalah suatu jenis komunikasi politik yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu oleh seorang individu, sekelompok individu, atau organisasi politik dalam upaya memenangkan hati publik (Fatmawati, 2013).

Dengan jangkauan yang luas dan kemampuan untuk menargetkan audiens tertentu, kandidat politik dapat menyampaikan pesan mereka secara efektif kepada pemilih. Selain itu, media sosial memungkinkan kandidat untuk berinteraksi langsung dengan pemilih, mendengar masukan mereka, dan menyesuaikan strategi kampanye berdasarkan respons yang diterima. Namun, media sosial juga membawa tantangan, seperti penyebaran informasi palsu

atau hoax, yang dapat mempengaruhi persepsi pemilih. Kreativitas digital adalah pemikiran seseorang atau kelompok dengan pendekatan baru dan unik untuk menemukan solusi dari suatu masalah pada media digital yang terhubung dengan internet. Pemasaran politik membutuhkan kreativitas untuk menarik pemilih potensial (Kuada, 2023).

Kreativitas dalam media digital menyebabkan orang memasuki masyarakat informasi. Partai politik yang aktif mengelola media daringnya, khususnya media sosial serta website dan aplikasi, akan terus mengasah kreativitasnya dalam teknis konten digital. Suatu bentuk kreativitas digital dalam penyampaian pesan politik kepada partai politik dan caleg dalam bentuk konten audio video, gambar diam dan artikel. Perbandingan antara strategi kampanye tradisional dan digital.

Strategi kampanye tradisional dan digital memiliki keunggulan serta kelemahan masing-masing, terutama terkait jangkauan, biaya, dan interaksi dengan pemilih. Kampanye tradisional, yang melibatkan penggunaan media seperti televisi, radio, koran, baliho,

serta pertemuan tatap muka, lebih cocok untuk menjangkau pemilih lokal, khususnya di daerah yang belum banyak terpapar teknologi digital. Sementara itu, kampanye digital memanfaatkan media sosial, email, dan situs web untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan tersebar secara geografis, sehingga lebih efektif untuk masyarakat perkotaan dan yang melek teknologi. Dari sisi biaya, kampanye tradisional cenderung lebih mahal, terutama dalam hal iklan di TV, baliho, dan cetak, serta memerlukan investasi untuk distribusi materi fisik seperti selebaran. Sebaliknya, kampanye digital lebih hemat biaya dan fleksibel dalam pengaturan anggaran.

Sebaliknya, kampanye digital lebih interaktif, memungkinkan pemilih memberikan umpan balik langsung melalui komentar di media sosial, dan kandidat dapat merespons dengan cepat. Kampanye tradisional sulit untuk dipersonalisasi karena sifatnya yang lebih massal, sedangkan kampanye digital memungkinkan pesan yang lebih personal dan dapat disesuaikan dengan preferensi demografis pemilih tertentu. Selain itu, strategi

digital lebih cepat dan fleksibel dalam melakukan perubahan, dibandingkan kampanye tradisional yang memerlukan waktu lebih lama untuk penyesuaian. Dalam mengukur hasil, kampanye digital memiliki keunggulan dengan kemampuan analisis real-time, sementara kampanye tradisional lebih sulit diukur secara tepat. Namun, kampanye tradisional sering kali dianggap lebih kredibel oleh audiens yang lebih tua yang masih bergantung pada media tradisional. Tantangan kampanye digital adalah menangani informasi palsu atau hoaks yang dapat merusak citra kandidat jika tidak dikelola dengan baik.

Adaptasi partai politik terhadap perkembangan teknologi digital menjadi semakin krusial di era modern, terutama untuk memperkuat hubungan dengan pemilih, memperluas jangkauan kampanye, dan mengelola citra dengan lebih efektif.

- a. Penggunaan Media Sosial: Partai politik memanfaatkan platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok untuk menjangkau pemilih, khususnya kalangan muda. Lewat konten kreatif,

seperti video singkat, infografis dan kampanye tagar, pesan dan isu politik dapat disampaikan secara lebih menarik dan mudah dipahami.

- b. Kampanye Berbasis Data (Data-Drive Campaigning): Teknologi digital memungkinkan pengumpulan data calon pemilih, dari demografi hingga preferensi. Data ini membantu partai merancang kampanye yang lebih terarah dan personal, bahkan menyesuaikan pesan untuk kelompok pemilih tertentu.
- c. Aplikasi dan Platform Digital: Beberapa partai menciptakan aplikasi yang memudahkan koordinasi anggota dan relawan, penyebaran informasi, serta rekrutmen anggota baru. Platform ini juga mendukung survei, pengukuran opini publik, dan pemberian umpan balik dari massa secara cepat.
- d. Penggalangan Dana Digital: Penggalangan dana melalui platform digital

makin populer, terutama di negara yang membutuhkan biaya besar untuk pemilu. Metode ini mencakup crowdfunding, donasi digital, atau merchandise yang terintegrasi dengan kampanye.

- e. Keamanan Siber: Dengan meningkatnya aktivitas digital, ancaman keamanan data juga meningkat. Partai politik mulai berinvestasi dalam teknologi keamanan siber untuk melindungi informasi sensitif dan menjaga kepercayaan masyarakat.
- f. Pemanfaatan AI dan Big Data: Teknologi AI dan big data digunakan untuk menganalisis tren politik, sentimen publik, dan prediksi pemilu. Teknologi ini membantu partai merespons isu lebih cepat dan menyusun strategi jangka panjang yang akurat.
- g. Penyebaran Informasi yang Akurat: Di tengah banyaknya hoaks dan disinformasi, partai politik perlu aktif menyebarkan

informasi yang benar dan transparan melalui kanal resmi mereka untuk mencegah dampak negatif pada citra mereka

2. Privasi Data Warga Negara

Kemajuan teknologi telah meningkatkan koleksi dan penggunaan data pribadi oleh pemerintah dan perusahaan. Privasi sangat penting, terutama ketika ada teknik pengawasan dan analitik data.

Selain kemajuan teknologi, data pribadi dan politik semakin direkam, dilestarikan dan dianalisis oleh berbagai perusahaan, termasuk perusahaan teknologi besar dan negara bagian.

Penggunaan data ini untuk tujuan politik dapat menimbulkan masalah etika terkait dengan hak privasi individu, keamanan data, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Ada kekhawatiran bahwa data ini dapat disalahgunakan untuk tujuan politik dan komersial, misalnya, data vote (suara) dapat digunakan untuk memprediksi hasil pemilu atau bahkan mempengaruhi keputusan pemilih. Oleh karena itu, meskipun teknologi digital menawarkan peluang yang signifikan untuk memperluas

partisipasi politik, penting untuk memastikan bahwa alat-alat ini digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Pengguna harus didorong untuk mengembangkan keterampilan digital yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dan kritis dalam diskusi politik, sementara pembuat kebijakan dan penyedia platform harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang muncul, seperti masalah keamanan informasi dan privasi. Dengan pendekatan yang seimbang dan strategis, teknologi digital dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan partisipasi politik dan mendukung proses demokrasi (Judita, Christiany & Darmawan, Josep, 2018).

3. Tantangan Etis Yang Muncul Seiring Perkembangan Teknologi

Kemajuan teknologi membawa sejumlah tantangan etis yang perlu dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan. Salah satu tantangan utama dalam etika politik di era digital adalah sejauh mana teknologi dapat digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan proses politik umum. Fenomena ini telah diamati terutama dalam upaya memanipulasi dan

memanipulasi informasi tentang platform media sosial dan berbagai situs web dan untuk memanipulasi disinformasi. Dengan algoritma yang dioptimalkan untuk menampilkan konten yang memicu emosi dan pandangan sesuai dengan preferensi pengguna, platform ini dapat menjadi alat yang ampuh untuk mempengaruhi persepsi publik, bahkan menggoyahkan stabilitas demokrasi. Oleh karena itu, pertanyaan etis muncul mengenai pertanggungjawaban teknologi ini dan meminimalkan risiko menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan yang dapat merusak proses politik yang demokratis. Pertanyaan muncul tentang bagaimana memastikan bahwa pengguna data politik dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika yang kuat, termasuk transparansi, pertanggung jawaban, dan keadilan. Selain dari aspek teknologi, perspektif sosial juga memainkan peran penting dalam memahami tantangan etika politik dalam era digital.

Perkembangan media sosial telah mempercepat penyebaran informasi, memperluas jangkauan dan kekuatan suara individu, dan memperkuat konektivitas antar

individu. Namun, dalam konteks politik, hal ini jugadapat meningkatkan polarisasi opini, pembentukan kelompok-kelompok yang tertutup, dan konflik sosial. Tantangan etika politik melibatkan pertanyaan tentang bagaimana mempromosikan dialog yang terbuka, toleransi, dan inklusi dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital ini.

4. Polarisasi Opini

Media sosial kini berfungsi sebagai instrumen krusial dalam komunikasi digital yang berpengaruh terhadap pandangan masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa komunikasi digital melalui media sosial memiliki peranan signifikan dalam membentuk pandangan publik. Penyebaran berita yang cepat, kemampuan untuk membagikan dan memberikan komentar pada konten, serta dampak dari sosok-sosok terkenal di platform media sosial, semuanya berkontribusi besar dalam membentuk cara pandang dan opini publik.

Analisis tentang dinamika interaksi antar pengguna mengungkap beberapa mekanisme penting yang terlibat dalam proses

pembentukan opini publik di media sosial.:

- a. Agenda setting
Topik yang kerap muncul dan diperbincangkan di media sosial biasanya dianggap sebagai masalah yang signifikan oleh masyarakat. Media sosial memiliki peran dalam membentuk agenda publik melalui fitur topik terkini dan saran konten.
- b. Framing
Cara penyajian informasi dan sudut pandang yang digunakan dalam postingan media sosial mempengaruhi persepsi publik terhadap suatu isu.
- c. Polarisasi
Terjadi pengelompokan opini yang ekstrem, di mana pengguna cenderung terpolarisasi ke dalam kelompok-kelompok dengan pandangan yang sama.
- d. Efek echo chamber
Pengguna cenderung terpapar informasi yang sejalan dengan keyakinan mereka, sehingga memperkuat opini yang sudah ada.

e. Viral Spreading

Informasi dan pendapat dapat didistribusikan ke virus melalui berbagi dan me-retweet mekanisme, menciptakan dampak manusia salju pada penyebaran pendapat.

Polarisasi adalah fenomena populer yang berkembang lebih banyak pada tingkat massa daripada di tingkat elit politik. *Wilson (2015)* menjelaskan bahwa polarisasi terjadi karena budaya, ideologi, atau keterlibatan yang kuat dalam kandidat untuk mengalahkan kelompok dan kelompok lain. Polarisasi membuat suatu kelompok menganggap pandangan dan prinsipnya yang paling benar, sedangkan kelompok yang berseberangan adalah kelompok yang salah pandangan politik dan moralitasnya.

Selain itu, polarisasi dapat diakibatkan oleh suatu perubahan framing komunikasi politik suatu partai. Perubahan dalam kerangka kerja dapat mengakibatkan perubahan sikap pendukung partai, bahkan perubahan dalam kartu politik dan budaya politik. Di sini, ketika partai menjelaskan masalah atau fenomena, efek kerangka kerja

terlihat, tetapi fokusnya akan menjadi bagian di mana pertimbangan pendapat pribadi dari *Druckman, Peterson, dan Soss (2013)* adalah poin utama. Hal ini senada dengan pernyataan dari *Slothuus (2010)* dalam *Druckman, Peterson dan Slothuus (2013)* yang menyatakan bahwa ketika sebuah partai mengubah framing komunikasi politik, maka para pendukung partai tersebut akan mengikutinya.

Mencapai konsensus yang berkelanjutan adalah sebuah tantangan, karena polisi dicirikan oleh pendapat yang tajam antara kelompok-kelompok politik (*McCoy et al., 2018*). Fenomena ini tidak hanya lokal, tetapi juga global. Polarisasi politik berpotensi kontraproduktif, tetapi juga dapat memiliki efek negatif berikut: B. Peningkatan konflik sosial, mengurangi kepercayaan pada pemerintah, dan hambatan pembangunan (*Muhtar et al., 2025*).

Di bidang online, polarisasi politik masyarakat dilihat oleh opini publik media sosial yang semakin terpecah. Hasilnya adalah polarisasi pendapat, perilaku politik, dan fragmentasi sosial. Media baru tidak hanya memberi tahu masyarakat mengenai isu yang harus dipikirkan,

tetapi juga bagaimana bertindak terhadap isu tersebut.

Polarisasi politik melalui media sosial telah menjadi fenomena global. Studi Fuchs di Media Sosial (2013): Perkenalan kritis ditingkatkan oleh algoritma media sosial, dan Tucker et al. (2018) membuktikan konten provokatif meningkatkan polarisasi sebesar 35%. Di Indonesia, penetrasi media sosial mencapai 73% (APJII, 2022), menciptakan ruang subur bagi buzzer politik

Media sosial juga bisa meningkatkan polarisasi dengan memberi kesempatan kepada orang untuk terus-menerus melihat pandangan yang sesuai dengan keyakinan mereka. Filter bubble ini dapat mempersempit pandangan masyarakat dan membatasi pemahaman yang seimbang. Media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau propaganda, yang dapat memengaruhi opini publik secara tidak adil.

Fenomena ini menghadirkan kesulitan dalam menjaga kelangsungan informasi yang benar dan tidak berpihak. Seiring dengan kemajuan internet dan teknologi digital, masyarakat disuapi oleh

beragam jenis data. Namun, sebagian dari informasi tersebut merupakan berita yang tidak benar, berita palsu, atau hoaks. Penyebaran elang melalui media sosial menjadi semakin di luar kendali, berkontribusi untuk mempromosikan ekstremisme di internet. Berita hoaks dimanfaatkan dalam persaingan politik untuk mengubah pilihan pemilih. Pertikaian politik yang dilakukan melalui penyebaran berita hoaks dapat mengakibatkan munculnya ekstremisme di ranah digital (*Mudjiyanto dan Dunan, 2020*).

5. Transformasi Partisipasi Masyarakat

Studi mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam politik pada zaman digital telah berubah secara drastis. Platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram telah menjadi saluran utama bagi masyarakat untuk terlibat dalam diskusi politik, menyebarkan informasi, dan mengorganisir kampanye. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa partisipasi politik kini lebih bersifat spontan dan dinamis, dibandingkan dengan bentuk-bentuk partisipasi yang lebih terorganisir sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh

perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang memungkinkan masyarakat, terutama generasi muda, untuk lebih mudah terlibat dalam diskusi politik dan menyuarakan pendapat mereka secara langsung.

Media sosial telah menjadi platform utama untuk menyebarkan informasi, membentuk opini publik, dan mengorganisir gerakan sosial, yang memungkinkan partisipasi politik terjadi secara lebih cepat dan responsif terhadap isu-isu yang berkembang. Dengan munculnya platform digital sebagai arena utama untuk partisipasi politik, kampanye politik harus menyesuaikan strategi mereka untuk memanfaatkan media sosial dan alat digital lainnya secara efektif. Ini mencakup pendekatan yang lebih responsif dan dinamis, di mana pesan politik harus dirancang untuk beradaptasi dengan berbagai format dan algoritma platform digital, serta memanfaatkan data analitik untuk memahami audiens dan merancang kampanye yang lebih terfokus (*Andriadi, Fayakhun, 2017*).

Transformasi ini juga menunjukkan perubahan dalam cara masyarakat melihat dan menyusun

definisi tentang keterlibatan politik. Partisipasi tidak lagi terbatas pada kegiatan formal seperti pemilu atau keterlibatan dalam organisasi politik, tetapi juga mencakup tindakan-tindakan yang lebih informal dan berbasis isu, seperti petisi online, kampanye media sosial, dan protes virtual. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat semakin kritis dan selektif dalam menanggapi isu-isu politik, dan lebih memilih untuk terlibat dalam aksi-aksi yang dirasa lebih relevan dan berdampak langsung.

Selain itu, wawancara juga mengungkap bahwa partisipasi politik yang bersifat spontan dan dinamis ini sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional dan keprihatinan pribadi terhadap isu-isu tertentu. Isu-isu yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari, seperti kebijakan ekonomi, lingkungan, dan hak asasi manusia, cenderung memicu reaksi yang lebih cepat dan intens dari masyarakat. Keterlibatan ini, meskipun lebih fleksibel dan tidak terorganisir, memiliki kemampuan yang signifikan untuk mengarah pada transformasi sosial dan politik, karena mampu menarik perhatian

publik secara luas dalam waktu singkat.

Dorongan bagi masyarakat untuk terlibat secara digital meliputi hasrat untuk menyampaikan pendapat, mendapatkan informasi yang lebih jelas, dan berkontribusi pada perubahan sosial. Banyak partisipan merasa bahwa platform digital memberikan mereka kekuatan yang lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan publik dibandingkan dengan metode tradisional. Platform digital, seperti jaringan sosial, situs diskusi, dan petisi daring, telah memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik. Hal ini memungkinkan individu untuk menyuarakan pendapat mereka, menggalang dukungan, dan menekan pembuat kebijakan dengan lebih cepat dan efektif.

Salah satu alasan utama mengapa partisipan merasa lebih berdaya adalah karena platform digital memungkinkan komunikasi langsung dengan pemangku kepentingan dan pejabat publik. Di era digital, suara individu tidak lagi terbatas pada ruang-ruang diskusi terbatas atau pertemuan formal, tetapi dapat disebarluaskan secara luas

dan mencapai audiens yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan tidak hanya lebih terbuka untuk semua, tetapi juga lebih peka terhadap perubahan pandangan masyarakat. Para peserta pun menyadari bahwa platform digital memberikan peluang untuk transparansi yang lebih baik dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan akses langsung terhadap informasi dan kemampuan untuk mengawasi tindakan pejabat publik secara langsung, masyarakat dapat lebih mudah memantau dan menuntut para pemimpin mereka agar dapat bertanggung jawab. Hal ini mengurangi jarak antara masyarakat dan pemerintah, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Namun, meskipun platform digital memberikan banyak peluang, ada juga tantangan yang harus dihadapi. Misalnya, tidak semua suara yang muncul di platform digital mendapat perhatian yang sama, dan ada risiko bahwa isu-isu penting bisa tenggelam dalam lautan informasi yang ada. Selain itu, ancaman disinformasi dan manipulasi informasi juga dapat mengganggu proses partisipasi

yang sehat. Oleh karena itu, penting bagi pengguna platform digital untuk tetap kritis, terinformasi, dan bijaksana dalam menggunakan teknologi ini untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan publik

KESIMPULAN

Perubahan dalam kebijakan politik di zaman digital merupakan sebuah fenomena yang rumit dan memiliki berbagai aspek. Penggunaan platform

media sosial dalam kampanye politik, perlindungan data pribadi warga, dan dilema etis yang dihadapi teknologi merupakan beberapa masalah utama dalam situasi ini. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, para pemimpin politik perlu berpegang pada prinsip transparansi, tanggung jawab, dan perlindungan hak-hak individu. Dengan strategi yang benar, teknologi bisa berfungsi sebagai alat yang memperkuat demokrasi serta meningkatkan kualitas pemerintahan.

DAFTAR REFERENSI

- Andriadi, Fayakhun (2017) *Partisipasi Politik Virtual*, Jakarta : RMBOOKS.
- Druckman, J. N., Peterson, E., Slothuus, R. (2013). How Elite Partisan Polarization Affects Public Opinion Formation. *American Political Science*. Vol. 107(1). *Jurnal Opini Publik Dalam Polarisasi Politik di Media Sosial* diakses pada <https://pdfs.semanticscholar.org/f238/1bca0fa9b50526e09106324c4a5cd6689065.pdf>.
- Fatmawati. (2013) *Kampanye Politik Sebuah Pendekatan Fenomenologi*. Banyumas : CV. Amerta Media. *Jurnal Dinamika Perilaku Politik Partai dalam Pembentukan Strategi Kampanye terhadap Stabilitas Politik di Era Digital* diakses pada <https://journal.unnes.ac.id/journals/JISSE/article/view/15597>
- Fuchs, C. (2013). *Social Media: A Critical Introduction*. SAGA.
- Halim,Umar & Jauhari, Kurnia Dyah (2019) *Pengaruh Terpaan Media Terhadap Partisipasi Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017*”, *Jurnal ASPIKOM*, Vol.4, No.1, Edisi Juli.
- Josep, (2018) *Partisipasi Politik Di Indonesia dan Upaya Pengembangannya*, Indocamp, 2018. *Jurnal Partisipasi Politik Masyarakat di Era Digital* di akses pada <http://www.irje.org/irje/article/view/937>.
- Judita,Christiany,Darmawan, Josep (2018) *Penggunaan Media Digital dan Partisipasi Politik Generasi Milenial*”, *Jurnal Penelitian Komunikasi dan opini Publik*, Vol.22, No.2 (Diakses pada 31 Mei 2025)
- Kuada,Celciane Meykristi,dkk (2023) *Peran Media Sosial Sebagai Sarana Marketing Politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal Dinamika Perilaku Politik Partai dalam Pembentukan Strategi Kampanye terhadap Stabilitas Politik di Era Digital* diakses pada <https://journal.unnes.ac.id/journals/JISSE/article/view/15597>.

- Mudjiyanto, B., & Dunan, A. (2020).
Sosial. Media Mainstream Jadi Rujukan Media
Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi
Massa, 1(1), 21–34. diakses pada
<https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/mkm/article/view/3244> .
- Sasmita (2011)
Jurnal Media dan Perubahan Sosial Studi
Kasus: Tentang Penggunaan Media Sosial
Dalam Kampanye Politik dan Dampaknya
Terhadap Partisipasi Politik diakses pada
<https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/260> .
- Muhtar, M., Setiyono, B.,
Fitriyah, F., & Sardini, N. H. (2025).
Political Polarization In The 2024 Local
Elections: An Analysis Of Its Impact And
Implications For Local Democracy In
Indonesia. JWP (Jurnal Wacana Politik),
10(1), 41–51.
<https://doi.org/10.24198/jwp.v10i1.58474>
Jurnal Industri Buzzer dan Polarisasi Politik di
Era Digital: Perspektif Ekonomi Politik Media
diakses pada
<https://tuturlogi.ub.ac.id/index.php/tuturlogi/article/view/18128>.
- Wilson, J. Q. (2005).
The Tanner Lectures on Human Values: I.
Politics and Polarization II. Religion and
Polarization Jurnal Opini Publik Dalam
Polarisasi Politik di Media Sosial diakses
pada
<https://pdfs.semanticscholar.org/f238/1bca0fa9b50526e09106324c4a5cd6689065.pdf> .
- Jurnal Tantangan Etika Politik Dalam Era Digital : Perspektif Sosial dan Teknologi diakses
pada
<http://liternote.com/index.php/ln/article/view/129>.
- Jurnal Peran Komunikasi Digital dalam Pembentukan Opini Publik: Studi Kasus Media
Sosial diakses pada <https://www.jurnal.iapa.or.id/proceedings/article/view/1059>.
-